

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN/MUI/VI/2000  
TENTANG JUAL BELI *ISTISHNA'***  
(Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian,  
Kabupaten Lampung Tengah)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah**

**Oleh :**

**Arman Prabowo**

**NPM. 1521030176**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1441/2019 M**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN/MUI/VI/2000  
TENTANG JUAL BELI *ISTISHNA'***  
(Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian,  
Kabupaten Lampung Tengah)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

**ARMAN PRABOWO  
NPM. 1521030176**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II: Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1441/2019 M**

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian antar penjual dan pembeli yang memiliki hubungan timbal balik dengan cara menukar harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang yang telah ditetapkan harganya atas dasar suka sama suka serta dibenarkan oleh syara'. Jual beli dibagi dalam beberapa macam, salah satunya adalah jual beli *istishna'*. Seiring dengan kemajuan zaman tidak jarang ditemukan orang yang menjual kembali barang yang masih dipesannya, namun barang tersebut belum berada di tangannya. Seperti yang terjadi pada konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa pada konveksi tersebut telah terjadi akad *istishna'*. Pihak A sebagai pembeli memesan untuk dibuatkan pakaian kepada B sebagai penjahit konveksi, lalu sebelum pakaian tersebut selesai pembuatan dan diterimanya, pihak A sudah menjual kembali barang tersebut kepada pihak C.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan jual beli *istishna'* menurut fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/VI/2000, dan bagaimana praktik jual beli *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik penjualan kembali barang yang di beli secara *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten lampung Tengah. Dan Untuk menjelaskan kesesuaian fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/VI/2000 tentang jaul beli *istishna'* dengan pelaksanaan akad *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabhupaten lampung Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian di konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan. Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang penulis dapat adalah Konsep jual beli secara *istishna'* menurut fatwa DSN-MUI merupakan kontrak penjualan atas jenis barang yang belum ada di tempat (*ready stok*) antara *shani'* (penjual/suplyer) dengan *mustashni'* (pembeli) dengan bahan baku disediakan oleh penjual/suplyer. Dalam hal pembayaran harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Pelaksanaan jual beli *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *istishna'* dimana *mustashni'* sebagai pembeli memesan barang kepada *shani'* selaku penjual dengan bahan baku yang sebelumnya sudah di sediakan oleh *shani'* (penjual/suplyer). Dalam sistem pembayaran *mustashni'* (pembeli) membayarkan uang muka sebagai tanda jadi akad dan akan di lunasi di akhir sesuai dengan barang yang di pesannya selesai di buat oleh *shani'* (penjual/suplyer)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arman Prabowo  
NPM : 1521030176  
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*’ (Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2019

Penulis

Arman Prabowo  
NPM. 1521030176





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI No 06/DSN/MUI/VI/2000  
Tentang Jual Beli *Istishna'* (Studi kasus Konveksi Arda Jaya  
Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten  
Lampung Tengah)

Nama : Arman Prabowo

NPM : 1521030176

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**

**NIP. 1962102219993031002**

**Pembimbing II**

**Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

**NIP. 197512302003121002**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor  
06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*” (Studi kasus Konveksi Arda  
Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)

Penguji Utama : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

Penguji Pendamping II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210219930310002



## MOTTO

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada :

1. Bapak dan Ibu Orang Tua terhebat, Bapak Sariono dan Ibu Sumarti, yang senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya disetiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Yang saya sayangi dan banggakan adik sekaligus saudara kandung satu-satunya David Witanto.
3. Yang saya banggakan sahabat baik Dwi Maskhuri Romadhon dan Resky Mertarega Saputri, SH yang selalu mendukung baik itu materi ataupun spiritual, mendoakan serta mengajarkan penulis akan arti hidup untuk mencapai kesuksesan dan berkat inspirasi yang diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta



## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Arman Prabowo. Penulis adalah putra pertama dari pasangan Bapak Sariono dan Ibu Sumarti. Di lahirkan di Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah 08 November 1997. Penulis mempunyai saudara kandung adik laki-laki yang bernama David Witanto.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan.

1. Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, masuk tahun 2002-2003.
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, masuk tahun 2003-2009.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Pubian Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, masuk tahun 2009-2012.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, masuk tahun 2012-2015.
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Progam Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada fakultas Syariah selesai pada tahun 2019.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*’ (Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pegikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Rektor Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua dan sekretaris jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;



4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku pembimbing I dan Eko Hidayat, S.SOS., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan segenap sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kepada teman-teman Muamalah F '15, dan teman-teman seperjuangan lainnya.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2019  
Penulis,

Arman Prabowo  
NPM. 1521030176

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikasi Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Gambaran Umum Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	16
B. Metode Istimbath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	38
C. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	50

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
1. Profil Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.....	53
2. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.....	58
3. Letak Konveksi Arda Jaya Tailor .....	60
B. Deskripsi Data Penelitian .....	60
1. Sistem Pembayaran pada Konveksi Arda Jaya Tailor di Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah .....	60



2. Pelaksanaan Jual Beli <i>Istishna</i> ' pada Konveksi Arda Jaya Tailor di Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.....	61
--	----

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Jual Beli <i>Istishna</i> ' Pada Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah.....	64
B. Kesesuaian dan Atau Tidak Sesuai Jual Beli <i>Istishna</i> ' Pada Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 .....	66

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *istishna*’ (Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)”.

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).<sup>1</sup>
2. Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya.
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.<sup>2</sup>
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayoman bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang paling berkompeten dalam

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup> *bid.* (Selanjutnya dalam skripsi ini penulisan Dewan Syariah Nasional di singkat menjadi DSN)



menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat.

5. Jual beli secara bahasa berasal dari kata “*al-bai*” yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
6. *Istishna'* adalah transaksi terhadap suatu barang dengan kriteria tertentu, dan barang itu ada dalam tanggungan penjual dengan pembayaran di awal, di tengah (cicil) atau di belakang, namun penyerahan barang tertunda.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan skripsi ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* (Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

### **1. Alasan Objektif**

Mengingat persoalan muamalah selalu mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman dan kemajuan pengetahuan manusia, terutama dalam masalah transaksi jual beli dengan akad *istishna'*.

---

<sup>3</sup> Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan slam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 206.

## 2. Alasan Subjektif

Judul skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

### C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah satu agama yang ajarannya universal, meliputi semua aspek kehidupan manusia. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Hubungan antara manusia dan penciptanya terdapat dalam masalah ibadah, sedangkan hubungan antar sesama manusia meliputi berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Seperti masalah sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang mu'amalah, dan sebagai makhluk sosial Allah SWT telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada yang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan usaha-usaha, seperti dengan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan usaha-usaha lainnya. Dan agar usaha-usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar dan teratur serta sesuai dengan tuntunan agama. Allah SWT telah menurunkan Al-Qur'an dan Rasul pun telah menjelaskan melalui hadist-hadistnya sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan usaha pokok manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, Al-Qur'an dan hadist telah menetapkan aturan-aturan tentang jual beli yang harus difahami oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Secara umum, Allah SWT telah menghalalkan jual beli melalui firmanNya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (Al-Baqarah : 275)<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan jual beli dan keharaman riba secara umum, selain itu penjual dan pembeli harus memperhatikan rukun serta syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli. Sehingga jual beli yang dilakukan menjadi sah menurut ketentuan syara'.

Jual beli baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah dikemukakan oleh ahli fiqih, adapun rukun jual beli tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penjual dan pembeli
2. Uang dan benda yang dibeli
3. Lafaz (kalimat jab qabul).<sup>5</sup>

Adapun syarat-syarat dalam jual beli tersebut diantaranya, bagi penjual dan pembeli harus baligh, berakal, dan saling ridho, dan untuk jab

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV Dipenogoro, 2000), h. 36.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 70.



qabul hendaklah atas mufakat bersama dan tidak disangkutkan atau digantungkan dengan urusan yang lain.

Adapun syarat-syarat benda atau objek yang akan diperjual belikan haruslah :

1. Bersih, suci.
2. Dapat dimanfaatkan.
3. Milik orang yang melakukan akad.
4. Dapat diserahkan.
5. Mengetahui barang yang akan diperjual belikan.
6. Barang yang diakadkan ada di tangan.

Seiring dengan perkembangan zaman, aplikasi jual beli yang terjadi dalam masyarakatpun bermacam-macam. Sehingga terkadang penjual dan pembeli tidak lagi memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Seperti jual beli gharar yaitu jual beli benda tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung, dan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang oleh syar'i, seperti menjual anjing, babi, khamar dan lain sebagainya. Selain itu ada istilah jual beli yang dikenal dengan jual beli *istishna'*.

Jual beli *istishna'* adalah transaksi terhadap suatu barang dengan kriteria tertentu, dan barang itu ada dalam tanggungan penjual dengan

pembayaran di awal, di tengah (cicil) atau di belakang, namun dalam penyerahan barang tertunda”.<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa jual beli *istishna'* adalah jual beli yang pembayarannya di awal, di tengah (cicil) atau di belakang sedangkan serah terima barangnya tertunda, karena barangnya masih dalam proses pembuatan, atau sering juga disebut dengan jual beli pesanan.

Terkait dengan hal tersebut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.06/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli *istishna'* memutuskan :

Pertama Ketentuan Tentang Pembayaran :

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua Ketentuan Tentang Barang :

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

---

<sup>6</sup> Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq* (Jakarta, 2004), h. 206.

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga ketentuan Lain :

1. Dalam hal pesananan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>7</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman tidak jarang ditemukan orang yang menjual kembali barang yang masih dipesannya, namun barang tersebut belum berada di tangannya. Seperti yang terjadi pada konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa pada konveksi tersebut telah terjadi akad *istishna'*. Pihak A sebagai pembeli memesan untuk dibuatkan pakaian kepada B sebagai penjahit konveksi, lalu sebelum pakaian tersebut selesai pembuatan dan diterimanya, pihak A sudah menjual kembali barang tersebut kepada pihak C.

---

<sup>7</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000.



Melihat fenomena di atas bahwa telah terjadi akad *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah antara pembeli dan pembuat pesananan. Namun jika di lihat dalam putusan DSN-MUI No.06/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli *istishna'* bahwa dalam ketentuan tentang barang Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Artinya fenomena yang terjadi di atas mengalami kesenjangan dengan fatwa yang di keluarkan oleh majelis DSN-MUI.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan akad jual beli secara *istishna'* yang terjadi pada Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ni lebih mengarah pada kesesuaian ketentuan jual beli *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor dengan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/VI/2000.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana ketentuan jual beli *istishna'* menurut fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/VI/2000 ?
2. Bagaimana praktik jual beli *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah ?

### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam skripsi di antaranya :

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik penjualan kembali barang yang di beli secara *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabhupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk menjelaskan kesesuaian fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/VI/2000 tentang jaul beli *istishna'* dengan pelaksanaan akad *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabhupaten Lampung Tengah.

## G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli *istishna'* serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik yang melakukan transaksi maupun tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/ mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dikarenakan metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, maka akan menggunakan identifikasi sebagai berikut :



## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkecamuk sebagai bentuk gejala sosial. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada dipustaka baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

### b. Sifat penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Menganalisis apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita.

## 2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan penjualan kembali barang yang di pesan secara *istishna'* pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'*. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang di ambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia. Yang di ambil pada konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran majalah) atau seseorang, mendapat nforasi dari orang lain.

## 3. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki kateristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan di teliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah pemilik konveksi Arda Jaya Tailor dan 5 (lima) orang pemesan (konsumen).

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian pokok dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Berdasarkan buku Dr. Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subyeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, jika subyeknya lebih dari 100 orang maka diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.<sup>8</sup> Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, yaitu 6 orang maka penelitian ini adalah penelitian populasi. Oleh karena itu, sampel dalam populasi ini berjumlah 6 orang.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lainnya.<sup>9</sup>

### b. Dokumentasi

---

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 80.

<sup>9</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 95.



Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>10</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dalam metode pengolahan data ini menggunakan beberapa cara diantaranya :

### a. Tahapan Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang masuk atau (*raw date*) terkumpul tu tidak logid dan meragukan, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah peneliti.

### b. Tahapan Sistematika Data

Tahapan Sistematika Data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

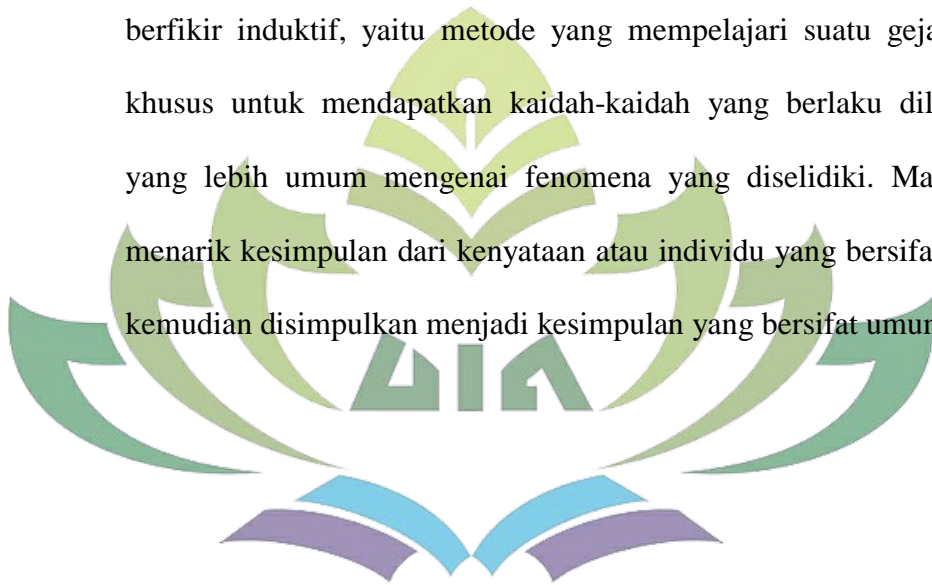
Dalam hal ini setelah melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data yang diperoleh baik data lapangan maupun kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,h. 124.

mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi dimasyarakat terkait dengan penjualan kembali barang yang di beli pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'*. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan ilmu serta pemahaman mengenai penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* menurut hukum Islam.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Maksudnya menarik kesimpulan dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Gambaran Umum Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas<sup>11</sup>. Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah ma'liyah*.<sup>12</sup>

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.<sup>13</sup>

Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi

---

<sup>11</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 289.

<sup>12</sup>Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 24.

<sup>13</sup>Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Didunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariat, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di lembaga ini



dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut syariahnya<sup>14</sup>.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah<sup>15</sup>.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada tahun 1999 MUI membentuk DSN dengan menerbitkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional.

Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah.<sup>16</sup> MUI memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan

---

<sup>14</sup> Karnaen A.Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992 ), h.2

<sup>15</sup> Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013) h. 156.

<sup>16</sup> Keputusan DSN-MUI No. 01 Th 2000

penetapan fatwa, yakni komisi fatwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>17</sup>

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, maka dibentuk lah dewan pengawas syariah. Yang mana keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsi-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan dewan syariah nasional No.3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan dewan syariah nasional (DSN).

Keberadaan dewan syariah nasional (DSN) dan dewan pengawas syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat berkerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan, ( Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 257.

<sup>18</sup> Muhammad Firdaus Dkk, Op. Cit. h. 14.

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam Q.S. At-Taubah 9 : 105)

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang mu'min akan melihat pekerjaan tu dan kamu akan dikembalikan kepada ( Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>19</sup>

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, CV, Penerbit Diponegoro, 2007). h. 204.

berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).<sup>20</sup>

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>21</sup>

Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>20</sup><http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar hukum persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangny/> di akses senin 08 Maret 2019 pukul 05:49.

<sup>21</sup><http://www.scribd.com/doc/4685584/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-agustianto> di akses senin 08 Maret 2019 pukul 06:30



Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Namun, apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah? Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang termasuk jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya menurut Pasal 8: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Berdasarkan Pasal 7 dan 8 di atas, fatwa tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu ia tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dipositifikan menjadi hukum positif. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bank Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan PBI No. 10/32/PBI/2008 membentuk Komite Perbankan Syariah. Tugas dari Komite Perbankan Syariah ini untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Intinya tugas Komite menyelaraskan PBI dengan Fatwa DSN-MUI. Dengan dituangkannya Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum.

Selain menjadi dipositifikasinya fatwa menjadi PBI, transformasi fatwa ke dalam hukum positif di Indonesia juga berbentuk peraturan perundang-undangan yang memuat unsur syariah di dalamnya seperti Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari'ah pun sejatinya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.<sup>22</sup>

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.<sup>23</sup>

Kaum muslimin meyakini bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, sejak mulai diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang lalu, hal ini tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang di lalunya, melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia.<sup>24</sup>

Dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan, pemerintah melihat bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di negara ini, memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah menilai bahwa suatu program, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses disokong oleh agama, atau sekurang-kurang ulama tidak menghalanginya. Ini

---

<sup>22</sup> Dewan Redaksi Fokusmedia (ed.), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 5.

<sup>23</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 3.

<sup>24</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994 ), cet.ke-1, h. 1.

berarti bahwa kerja sama dengan ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah. Untuk maksud tersebut, di zaman Soekarno telah didirikan Majelis Ulama yang kemudian disusul dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama Daerah. Namun, wujud dari Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu belum mempunyai pegangan dan cara kerja yang seragam, sampai akhirnya atas prakarsa pemerintah Orde Baru diadakanlah suatu Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama propinsi se-Indonesia di Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975. Musyawarah inilah yang berhasil secara bulat menyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>25</sup>

Fatwa-fatwa yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu dari masyarakat sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta ciri-ciri hukum Islam yang dijadikan acuan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghasilkan suatu fatwa. Oleh sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amat perlu dilakukan.<sup>26</sup>

Sudut pandang sorotan akan peranan MUI sangat beragam mulai dari aspek hukum, politik, sosial budaya, maupun soal ekonomi. Keberagaman cara pandang dan sudut dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa dan

---

<sup>25</sup> Ibid., h. 9

<sup>26</sup> Ibid., h. 11



bernegara. Respon positif atas fatwa tersebut muncul dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dinamika keberagamaan di Indonesia.

MUI sebagai wadah silaturahmi ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan umat dalam rangka menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional Republik Indonesia. Kegairahan dan kerinduan akan perlunya Majelis Ulama ini mulai menunjukkan titik-titik kelahirannya melalui usaha mengintensifkan kegiatan, diantaranya, di antaranya berupa daerah upaya menggairahkan kegiatan Majelis Ulama yang sudah ada di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri menginstruksikan supaya di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama supaya membentuknya secepat mungkin. Pada bulan Mei 1975, di seluruh Daerah tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II Majelis Ulama sudah terbentuk, sedangkan di pusat dibentuk pula suatu Panitia Persiapan Musyawarah Nasional yang diketuai oleh H. Kafrawi, MA yang bertujuan menyiapkan materi kegiatan serta tema musyawarah.<sup>27</sup>

Untuk realisasi selanjutnya, Menteri Agama membentuk suatu Panitia Musyawarah Nasional Majelis Ulama seluruh Indonesia dengan surat keputusan Nomor 28 tanggal 1 Juli 1975 yang diketuai oleh H. Soedirman, dengan team Penasehat yang terdiri atas Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghazali, dan KH. Abdullah Syafi'i. Dalam keputusan tersebut ditetapkan pula

---

<sup>27</sup> Ibid., h. 80

bahwa musyawarah itu akan berlangsung pada tanggal 21 sampai 27 Juli 1975 di Convention Hall Senayan Jakarta.

Realisasi Musyawarah Nasional Majelis Ulama se-Indonesia, sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dibuka oleh Presiden Soeharto pada hari Senin tanggal 21 Juli 1975 bertepatan dengan 13 Rajab 1395 H, di Istana Negara Jakarta. Musyawarah Nasional ini dalam sejarah MUI dikenal dengan (Munas) I, yang diikuti oleh 200 orang peserta. Pada tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 disetujui dan ditandatangani Piagam berdirinya Majelis Ulama oleh 53 orang ulama terkemuka serat disusun pula pengurusnya untuk periode 1975-1980 dengan Ketua Umumnya Prof. Dr. Hamka. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah yang penting bagi umat Islam Indonesia.

Adapun visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah :

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu’ama, aghniya dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*izzu al-Islam Wa al-Muslimin*) guna perwujudannya. Dengan demikian posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syari’at Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmat li al-‘alamin*) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia.”<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sekretariat MUI, Dokumentasi, tahun 2013.

Sementara misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah :

“Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam sevara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khairal-ummah*.”

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekular nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam.<sup>29</sup> Salah satu tugasnya, MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya.

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka Munas I MUI telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi:

1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat slam umumnya sebagai *amal ma'ruf nahi munkar*, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang undangan, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 44

2. Memperkuat ukhuwah slamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
3. Mewakili umat slam dalam konsultasi antar umat beragama.
4. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyuksekkan pembangunan nasional.
5. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama ndonesia melaksanakan usaha-usaha :

1. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat slam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Swt.
2. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakat kepada pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah slamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa.
4. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensuksekkan pembangunan nasional.
5. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara berbagai organisasi, lembaga Islam, dan cendikiawan muslim.



6. Mewakili umat slam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
7. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Dari sinilah MUI mulai melangkah sedikit demi sedikit ke arah perumusan kegiatan dan membuat program kerja, yang baru mulai terumuskan pada Munas I tahun 1980.

Hasil Munas I, terutama tentang program kerja, gunanya adalah untuk mengarahkan, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan. Di situ dirumuskan bahwa program tu bertujuan untuk :<sup>30</sup>

1. Memantapkan, meningkatkan, dan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi para ulama.
2. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran hidup beragama di kalangan umat/masyarakat dalam tatanan masyarakat sosial religius dalam wadah negara RI yang berfalsafah Pancasila.
3. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.
4. Memantapkan dan meningkatkan peranan ulama dan partisipasi umat slam dalam menyukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, untuk mewujudkan stabilitas nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta diridhoi Allah SWT.

---

<sup>30</sup> *bid.*, h. 93.

Ketika Munas II yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di Jakarta, MUI menghasilkan pula program kerja untuk periode 1985-1990, dengan sasaran:

1. Melakukan peningkatan serta pendalaman beragama dalam arti agar umat Islam mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran slam, sehingga terwujud suatu masyarakat yang benar-benar takwa kepada Allah Swt.
2. Dalam mencapai sasaran tersebut, selayaknya para ulama, zu'ama, cendekiawan muslim, dan umat slam pada umumnya secara lebih sadar meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan nasional, karena tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (1983) adalah serasi dengan kepentingan umat slam.
3. Dalam rangka mempersiapkan hari depan yang lebih baik, menginsafi banyaknya tantangan hidup sebagai akibat sampingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyadari akan kemungkinan. Timbulnya paham-paham yang membawa pengaruh tidak menguntungkan bagi umat slam indonesia, maka Majelis Ulama indonesia memandang perlu untuk menyiapkan generasi muda slam dalam menyongsong hari depan dengan iman dan amalnya melaksanakan pembangunan nasional yang mempunyai dimensi keterikatan antara kesejahteraan duniawi dan ukhrowi dalam menyongsong lepas landas pembangunan nasional.

4. Meningkatkan usaha-usaha bimbingan kepada umat Islam Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabatnya dengan memberantas kebodohan, keterbelakangan, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat merusak tata kehidupan beragama dan moral bangsa, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornoisme, sadisme, dan perjudian dalam segala bentuknya

Adapun Program Kerja MUI periode 1990-1995 dihasilkan pada Munas V yang berlangsung dari tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta yang garis besarnya terdiri atas pengantar, dasar pemikiran, program fungsional, program institusional, rekomendasi dan penutup. Perumahan program kerja ini dimaksud sebagai kerangka acuan pelaksanaan fungsi MUI pada periode 1990-1995 yang didasarkan atas evaluasi dan kelanjutan program periode sebelumnya serta pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan peranan MUI pada masa kini dan masa-masa mendatang.<sup>31</sup>

Adapun Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia periode 2015-2020 adalah :

1. Dewan Penasehat

Ketua	: Prof. Dr. KH. Tolchah Hasan
Wakil Ketua	: KH. Kafrawi Ridwan, MA
Wakil Ketua	: Letjen TNI (Purn) r. H. Azwar Anas,DDR.
Wakil Ketua	: Dr.dr. H. Tarmizi Taher

---

<sup>31</sup> *bid.*, h. 96

Wakil Ketua	: Drs. KH.A. Nazri Adlani
Wakil Ketua	: H. Chairul Tanjung
Wakil Ketua	: Hj. Aisyah Amini, SH, MH.
Wakil Ketua	: Drs. H. rsyad Djuwaili
Wakil Ketua	: Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaid
Sekretaris	: Drs. H. Abdul Rosyad Saleh
Sekretaris	: Drs.H. rfan, SH, MPd
Sekretaris (ex officio)	: Drs.H.M. chwan Sam
Anggota	: Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si
	: r. H. M. Hatta Rajasa Prof.
	: Dr. H. Muhammad Nuh
	: Prof. Dr. Salim Segaf Al-Jufri
	: Dr. H.M. Maftuh Basyuni
	: Prof. Dr.H. Quraisy Shihab
	: Dr. KH. Hasyim Muzadi
	: Prof. Dr. Said Aqil Siradj
	: Prof. Dr. Asjmuni Abdurrahman
	: Drs. H. Bachtiar Chamsah
	: Dr.H. Sulastomo, MPH
	: Prof. Dr.Hj. Chamamah Suratno
	: Dra. Hj. Khofifah ndar Parawansa, M.Si
	: Dra. Hj. Siti Nurjanah Djohantini, M.M
	: Drs. H.A. Chalid Mawardi

: H. smael Hasan, SH

: Prof. Dr.H. Muardi Chatib

: Dra. Hj. Asmah Syahroni

: Prof. Dr. KH. Hasan Shohib

: KH. Syuhada Bahri, Lc.

: KH. Cholid Fadlullah, SH

: H. Yudo Paripurno, SH

: Hj. Aisyah Hamid Baidlowi

: KH. r. Salahudin Wahid

: KH. Bunyamin

: KH. Abdurrahman Nawi

: KH. Maktub Effendi

: KH. Mahrus Amin

: KH. Abdur Rasyid AS

: Prof. Dr. Amir Syarifuddin

: Drs. H.A. Mubarak

: Drs. H. Rusydi Hamka

: Dr. Hj. Suryani Thaher

: Prof. Dr.Hj. Aisyah Girindra

: Prof. Dr. H. Azyumardi Azra

: H. Margiono

: Prof. Dr. H. Bachtiar Efendi

: Dr. H. Wahiduddin Addams, MA



: Prof. Dr. KH. Miftah Faridh

: KH. Abd. Shomad Buchori

: Drs. H. Djauhari Syamsuddin

: H. M. Trisno Adi Tantonio

: Geys Ammar, SH

: Dr. H. Deding shak, SH, MH.

: Prof. Dr. Hj. Nabilah Lubis

: Prof. Dr. KH. Muslim Nasution, MA

: Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman

: Drs. H. Zaidan Djauhari

: Dr. Anwar Sanusi, SH, S.Pel, MM

: Prof. Dr. Husni Rahim

: Dr. dr. Rofiq Anwar

: KH.Nurhasan Zaidi

: Drs. H. Kurdi Musthofa, M.Si

: Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA

: Drs. H. Marwan Saridjo

: Dra. Hj. Bariroh Uswatun Hasanah<sup>32</sup>

## 2. Dewan Pimpinan Harian

Ketua Umum : Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

Wakil Ketua Umum : KH. Dr. (HC) Ma'ruf Amin

Ketua-Ketua:

---

<sup>32</sup>MUI, Pengurus MUI, diakses tanggal 15 Sep 2019 <http://mui.or.id/mui/category/tentang-mui/pengurus-mui/periodeberjalan/dewanpertimbangan>.

1. Kabid. Fatwa : KH Ma'ruf Amin
2. Kabid. Ukhuwah slamiyah : H Umar Shihab
3. Kabid. Dakwah : H Amrullah Ahmad
4. Kabid. Pendidikan dan Kaderisasi : KH Abdullah Syukri Zarkasyi
5. Kabid. Pengkajian dan Penelitian : H Yunahar Iyas
6. Kabid. Hukum dan Perundangan : H Basri Barmanda
7. Kabid. PPH : H Amidhan
8. Kabid. Pemberdayaan Ekonomian : H Anwar Abbas
9. Kabid. PPKPA : Hj Tutty Alawiyah.
10. Kabid. Remaja dan Seni Budaya : Cholil Ridwan
11. Kabid. KUB : Slamet Effendy Yusuf
12. Kabid. Hubungan dan KI : KH Muhyidin Djunaedi
13. Kabid. nfokom : H Sinansari ecip
14. Kabid. Ling. Hidup dan SDA : KH Hafidz Usman
- Sekretaris Jenderal : HM chwan Sam
- Wakil Sekjen : H Zainut Tauhid Sa'adi
- : Hj Welya Safitri
- : H Natsir Zubaidi
- : H Tengku Zulkarnaen
- : Amirsyah Tambunan
- : Noor Ahmad
- : Hj Amani Lubis
- Bendahara Umum : Hj Juniwati

Bendahara : H Ahmad Djunaedi  
 : H Nadzratuzzaman Hosen  
 : H Chunaini Saleh  
 : Tabri Husein<sup>33</sup>

Hingga tahun 2006, fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN sebanyak 53 fatwa termasuk jual beli Salam dan *istishna'*. Fatwa tentang jual beli salam, jual beli *istisna'*, dan jual beli *stisna'* parallel ditetapkan oleh DSN dengan beberapa pertimbangan bahwa pihak perbankan telah terlibat jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dulu dengan syarat-syarat tertentu yang disebut dengan salam. Selain itu masyarakat membutuhkan memperoleh sesuatu dengan melibatkan pihak lain untuk membuatnya dan hal seperti ini dapat dilakukan melalui jual beli *istisna'*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati, antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Jual beli *istisna'* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah pada umumnya secara paralel yaitu sebuah bentuk akad *istisna'* antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari'ah, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, Lembaga Keuangan Syari'ah memerlukan pihak lain sebagai pembuat atau produsen. Fatwa ini juga dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada perbankan syari'ah agar praktek syari'ah tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan fatwa tentang jual beli salam, fatwa tentang *istisna'* dan fatwa tentang *istisna'* paralel ini terdiri dari kutipan ayat Al-Qur'an dan Hadist. Dari segi

---

<sup>33</sup>MUI, Pengurus Harian, diakses tanggal 16 Sep 2019  
<http://mui.or.id/mui/category/tentangmui/pengurus-mui/periode-berjalan/pengurus harian>.

metodologi fatwa tersebut menggunakan metode *ijma'* untuk penetapan fatwa jual beli salam.

## **B. Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Menurut pedoman tata cara penetapan fatwa, setiap masalah yang di bahas di Komisi Fatwa haruslah memperhatikan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Di samping itu, Komisi Fatwa ini juga harus memperhatikan pendapat-pendapat imam madzhab dan fuqaha terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya.

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-maslahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqasid al-syari'ah*), dengan tanpa berpegang pada *al-nusus alsyari'iyah* termasuk kelompok yang keablasan (*ifrati*).

Fatwa sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, erat sekali hubungannya dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Selain itu fatwa adalah salah satu dari lima produk pemikiran hukum Islam yang di pelajari dan diteliti seperti, kitab-kitab fiqh, keputusan pengadilan agama, perundangan yang berlaku di negara muslim, kompilasi hukum Islam dan fatwa.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Mohammad Atho Mudzhar *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998), hal. 245.

Sehubungan dengan penetapan hukum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI maka terdapat tiga pola ijtihad yang dapat dirujuk yaitu pola *bayani* (kajian semantik), pola *qiyasi* (pola *ta'lili*) yaitu penentuan *illat* dan pola *istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum).

Ke dalam pola pertama dimasukkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik): kapan sesuatu lafal diartikan secara majaz; bagaimana memilih salah satu dari lafal musytarak (ambiguitas), mana ayat yang umum, yang diterangkan (*'am, mubayyan, lex generalis*) dan mana pula yang khusus, yang menerangkan (khas, *mubayyin, lex specialis*), mana ayat yang *qat'i* (yang artinya tidak dapat berubah) dan mana pula yang zani, kapan sesuatu perintah dianggap untuk wajib dan kapan pula untuk sunat, kapan larangan itu untuk haram dan kapan pula untuk makruh dan seterusnya.

Ke dalam pola kedua dimasukkan semua penalaran yang menjadikan 'illat (keadaan atau sifat yang menjadi tambatan hukum) sebagai titik tolaknya. Di sini dibahas cara-cara menemukan 'illat, penggunaan 'illat di dalam qiyas dan istihsan serta pengubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan 'illat baru (sebagai pengganti yang lama).

Pola ketiga mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai nas khusus sebagai rujukan. Dalam pola ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum), yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan (*daruriyat*, kebutuhan esensial; *hajiyyat*,



kebutuhan sekunder dan *tahsiniyat*, kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.

Di dalam praktik, biasanya pola ta'lili digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola bayani. Mungkin untuk memperkuat argumen, tapi mungkin juga untuk mengalihkannya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna. Pola isti slahi sesuai dengan keadaannya, baru digunakan bila tidak ada dalil khusus hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan baru yang biasanya muncul karena penggunaan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>35</sup>

Dalam kaitan dengan masalah sebagai tujuan tasyri' merupakan pola dalam rangka memahami tujuan penetapan hukum Islam, yaitu kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, terutama dalam bidang mu'amalah. Dalam kaitan ini penggunaan ketiga pola ijtihad di atas dapat diterapkan secara bersamaan, yaitu memahami nas, menelusuri 'illat nash dan memikirkan secara mendalam tentang kemaslahatan yang merupakan tujuan penetapan hukum Islam.<sup>36</sup>

Bila istilah sumber hukum itu dikaitkan dengan kenyataan yang diinginkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pedoman tentang tata cara penetapan fatwa menyebutnya dengan istilah “dasar-dasar fatwa”. Pedoman tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar-dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*

---

<sup>35</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hal. 119.

<sup>36</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 64.

ini berarti bahwa ada empat dasar utama yang harus dipegang dan dijadikan sebagai sumber pokok dalam berijtihad atau sebagai sumber hukum dalam *beristidlal*. Istilah lain untuk menyebutkan “sumber hukum” itu ialah “dalil hukum”.

Secara eksplisit dikatakan bahwa metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. Dalam membahas suatu masalah untuk ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu. Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, MUI amat memperhatikan manhaj apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang sedang dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga ini adakalanya memakai istihsan, istislah, atau metode-metode istinbat lainnya.

Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh MUI sebagai sumber hukum hanya empat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai ad-dalail al-syar'iyyah al-ijma'iyah. Selain dari empat sumber yang disepakati itu, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah istihsan, mashlahah mursalah, istishhab, *'urf*, madzhab sahabat, dan *syar'man* qablana.

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh para ahli untuk menempatkan sumber-sumber hukum di atas, maka yang akan dikaji dalam uraian ini hanyalah terbatas pada bagaimana kenyataan MUI menempatkan dan menerapkan sumber-sumber hukum di atas dalam bidang komisi fatwa untuk melahirkan suatu produk hukum. Kajian ini pun hanya terbatas pula pada sumber hukum yang pernah mereka pakai dalam melahirkan fatwa, serta tidak akan menyebutkan sumber hukum yang belum pernah mereka terapkan dalam melahirkan fatwa.

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril kedalam hati Nabi Muhammad bin Abdullah dengan Lafazh yang berbahasa Arab dengan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasullulah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurbah dimana mereka membacanya.<sup>37</sup>

Al-Qur'an dan wahyu memiliki kaitan yang erat, karena Al-Qur'an merupakan bagian dari wahyu Allah. Menurut etimologi, wahyu sendiri bermakna isyarat yang cepat (termasuk bisikan dalam hati dan ilham), surat, tulisan dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Sedangkan secara istilah wahyu adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah baik

---

<sup>37</sup> Abdul Wahhab Khallab, Ilmu Ushul Fiqh, (tt, Darul Hadis, 203), h, 26.

dengan perantara atau tanpa perantara.<sup>38</sup> Untuk definisi Al-Qur'an, meskipun berbagai kalangan memberikan definisi yang berbeda-beda, namun tidak memiliki perbedaan yang begitu berarti.

Ahli ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa Al-Qur'an menduduki sumber dan dalil pertama hukum syara' yang berarti dalam menetapkan hukum, pertama harus mencari jawabannya dalam Al-Qur'an, setelah tidak menemukannya dalam Al-Qur'an baru mencarinya dari sumber dan dalil lain dibawahnya.<sup>39</sup>

Sebagaimana yang pernah disinggung pada uraian terdahulu, bagi MUI Al-Qur'an adalah dasar pertimbangan yang utama dalam berijtihad. Dalam menghadapi suatu masalah yang perlu difatwakan, Komisi Fatwa MUI berpedoman dan mengacu kepada keputusan Lembaga Riset al-Azhar Mesir, yang bersidang pada bulan Maret 1964 yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber utama dalam menetapkan hukum. Dari sini terungkap dengan jelas bahwa MUI menjadikan al-kitab sebagai hujjah dan sumber hukum.<sup>40</sup>

## 2. Sunnah

Sunnah yang merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata kerja *sanna-yasunnu-sunnatan*, yang berarti jalan yang sering dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti sunnah ini secara bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Qurais Shihab, *Sejarah dan Ulumul Quran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 48.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 42

<sup>40</sup> Helmi Karim, *op.cit.*, h. 125.

<sup>41</sup> Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, h. 55.

As-Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*).<sup>42</sup> Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam setidaknya-tidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi kewajiban umat Islam mematuhi dan meneladani Rasulullah SAW, dan dari segi fungsi sunnah terhadap Al-Quran.<sup>43</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa kata Hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu sama-sama segala berita yang bersumber dari Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir Nabi. Pendapat lain mengatakan bahwa pemakaian kata Hadis berbeda dengan sunnah. Kata Hadis dipakai untuk menunjukkan segala berita dari Nabi secara umum. Sedang kata sunnah dipakai untuk menyatakan berita yang bersumber dari Nabi yang berkenaan dengan hukum syara'.

Bagi MUI, sunnah Nabi merupakan suatu pedoman pokok dalam menyelesaikan berbagai persoalan, sebagaimana Al-Qur'an. Sunnah adalah salah satu "dasar-dasar fatwa". MUI mengatakan bahwa "hadis Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sumber syari'at Islam yang wajib dipegang oleh umat Islam. Karena itu, keterikatan MUI kepada sunnah sebagaimana keterikatan kepada Al-Qur'an sangat kuat."<sup>44</sup>

### 3. *Ijma'*

Seperti yang disinggung sebelumnya, adalah mengherankan untuk memasukkan *ijma'* ke dalam sumber hukum. Karena *ijma'* sebagaimana yang

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 40.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 138.

<sup>44</sup> Helmi Karim, op.cit., h. 133.



dipahami dalam literatur-literatur filsafat hukum Islam hanyalah metode dalam mengambil keputusan hukum. Akan tetapi posisi sebagai sumber hukum menjadi jelas seperti yang dikemukakan oleh Ahmad an-Naim.<sup>45</sup>

*Ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Dengan disepakatinya *ijma'* sebagai sumber hukum ketiga oleh jumbuh ulama, berarti ia merupakan salah satu sumber hukum yang kuat dalam system hukum Islam.

Pengertian *ijma'* sebagai sumber hukum harus dipahami dari konsep awal *ijma'* tersebut. Ketika sunnah dikonotasikan dengan sunnah Nabi, maka tradisi hidup sahabat dan beberapa generasi setelahnya diturunkan derajatnya sebagai sumber hukum Islam yakni sebagai sumber ketiga. Semuanya diakumulasi dalam *ijma'*.

Keabsahan *ijma'* sebagai sumber hukum didasari pula oleh keyakinan umat Islam bahwa para mujtahid yang benar mustahil akan berbuat sewenang-wenang dalam persoalan agama. Dijadikan *ijma'* sebagai salah satu sumber hukum oleh MUI dalam berfatwa, secara tersurat dapat dilihat pada pasal 1 Pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa. Sebagai bukti penggunaan *ijma'* sebagai sumber hukum oleh MUI dapat ditunjukkan bahwa dari fawa-fatwa yang diteliti ternyata ada dua buah fatwa yang menempatkan *ijma'* sebagai dasar pertimbangan dalam menghasilkan fatwa, yakni fatwa

---

<sup>45</sup> Naim, *op.cit* h 47.

tentang “Aliran yang menolak Sunnah/Hadits” dan fatwa tentang “Iddah Wafat”.

#### 4. Qiyas

Qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.<sup>46</sup>

Sumber yang sering ditempatkan sebagai sumber ke-empat adalah *Qiyas*. *Qiyas* merupakan perluasan dari hukum yang ada. *Qiyas* merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan hukum. *Qiyas* ini pada mulanya merupakan ikatan dan batasan terhadap penggunaan *ra'yu* yang telah marak hingga zaman Syafi'i. Dengan tujuan menyandarkan hukum kepada Alquran maupun sunnah, maka *qiyas* inipun diatur dalam sistem metode pengambilan hukum.<sup>47</sup>

Bagi MUI, qiyas adalah salah satu dasar pokok dalam berfatwa. Dalam pasal 1 Pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa dinyatakan bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Pengambilan putusan fatwa MUI melalui ijtihadnya dilakukan diantaranya “berpegang dengan dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur, yaitu al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan Qiyas.

---

<sup>46</sup> Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 59.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 256.

## 5. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh istihsan ialah berpalingnya seorang mujtahid dari qiyas yang jali (nyata) kepada tuntunan qiyas yang khafi (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istitsnaiy (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan perpalingan ini.<sup>48</sup>

Suatu hal penting yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa MUI dapat menerima istihsan sebagai salah satu dalil dalam ber-istinbat. Kesimpulan ini diambil dari berbagai pernyataan MUI yang menyebutkan bahwa dalam berijtihad untuk memecahkan berbagai persoalan ia menempuh berbagai manhaj seperti yang lazim dipakai oleh aimmah al-mujtahidin tanpa terus terkait kepada metode madzhab tertentu. Cara kerja MUI dalam mengistinbatkan hukum itu merupakan upaya mencari dan menemukan pendapat yang lebih membawa kepada kemaslahatan bagi umat.

Istihsan karena kemaslahatan juga merupakan salah satu istinbat hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa. Hal ini terlihat pada fatwa tentang “menghibahkan Kornea Mata” dan fatwa tentang “Pemindahan Katub Jantung”. Menghibahkan kornea mata dan pemindahan katub jantung yang dimaksud dalam fatwa MUI itu adalah mengambil kornea mata atau katub jantung dari orang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang yang masih hidup.

---

<sup>48</sup> Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 88.

## 6. Istislah

Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalanya. Bagi MUI, istishlah diterimanya sebagai salah satu metode ijtihad. Kendatipun penerimaan itu tidak dinyatakan secara eksplisit, namun indikasi ke arah itu dapat dilihat dalam pernyataan lembaga ini, seperti :

“MUI berpegang dengan dalil yang disepakati oleh jumhur yaitu Al-Qur'an, Sunnah/Hadits, Ijmak dan kias dan dalil-dalil lain yang dipandang relevan. Kemaslahatan umum (khususnya dalam hal-hal kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan orang banyak) adalah prioritas utama yang dijadikan pertimbangan keputusan fatwa MUI.<sup>49</sup>

Di dalam Pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa disebutkan bahwa kemaslahatan adalah salah satu dasar pertimbangan dalam berfatwa. Ketika mentarjih pendapat, MUI sangat mengutamakan pendapat dengan mempertimbangkan mana di antaranya yang paling sesuai dengan kemaslahatan. Walaupun suatu pendapat agak lemah argumennya, tetapi mengandung kemaslahatan, maka kemaslahatan itu bisa didahulukan.

---

<sup>49</sup> Helmi Karim, op.cit., h. 181.

## 7. *Istishab*

*Istishab* menurut bahasa Arab ialah pengakuan adanya penghubungan. Sedangkan menurut para ahli ilmu ushul fiqh ia adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukan atas perubahan keadaan tersebut.<sup>50</sup>

Sepanjang penelitian yang dilakukan, tidak ditemui suatu pembahasan yang khusus MUI tentang *istishhab*. Penerimaan lembaga ini terhadap *istishhab* pun tidak pula dinyatakannya secara tegas, tetapi MUI hanya pernah menyatakan bahwa dalam berfatwa mereka senantiasa memakai metode yang lazim dipergunakan oleh imam-imam mujtahid. Berdasarkan pernyataan tersebut, mustahil bila disimpulkan bahwa MUI tidak memakai *istishhab*.

## 8. *Dzari'ah*

Bagi MUI, *dzari'ah* itu dipakainya sebagai *istinbat* dalam berfatwa, walaupun *dzari'ah* diperselisihkan pemakaiannya oleh para ulama, namun hal ini bukanlah alasan bagi lembaga ini untuk menolaknya. Menurut MUI, apa pun *istinbat* yang dipakai ulama dan siapa pun ulama yang mempergunakannya, hal ini bisa mereka pakai dalam berijtihad sepanjang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas serta sesuai dengan kebutuhan guna mewujudkan hal-hal yang maslahat bagi umat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 103.

<sup>51</sup> Helmi Karim, op.cit., h. 191.



## 9. Dalil-dalil Lain.

Dalil-dalil lain yang dimaksud di sini ialah penggunaan dalil dalam berijtihad selain yang sudah disebutkan di atas, yakni *'urf, syar'u man qablana* dan madzhab sahabat. Pemakaian *'urf dan syar'u man qablana* dalam beristinbat untuk menghasilkan fatwa oleh MUI tidak ditemui. Hal ini bukanlah berarti bahwa lembaga ini tidak memakai dalil tersebut, tetapi belum pernah mereka terapkan disebabkan belum adanya suatu kasus yang mereka nilai layak diselesaikan dengan dalil-dalil ini. Ini berarti bahwa mungkin saja pada suatu saat mereka akan mempergunakannya sepanjang ada kemungkinan untuk beristidlal dengan *'urf ataupun syar'u man qablana*.

### C. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*

Lahirnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI) yang kedudukannya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan formal bagi kekuatan mengikat fatwa DSN-MUI bagi pelaku aktifitas ekonomi syariah, khususnya Perbankan Syariah. Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai “legitimasi” bahwa produk Perbankan Syariah telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebagaimana nilai dan moralitas yang diinginkan oleh aktivitas ekonomi syariah.<sup>52</sup>

Dewan Syari'ah Nasional dan majelis Ulama Indonesia pada tanggal 4 April 2000 atau 29 Dzulhijjah 1420 H, menetapkan fatwa DSN-MUI NO 6/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *istishna'*. Bahwa kebutuhan

<sup>52</sup> <http://www.dsnmui.or.id/> diakses 10 April 2019 pukul 08:50

masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna'* (الاستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

*Bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli dengan spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.

Bahwa transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syaria'ah. Maka agar praktek tersebut sesuai dengan syaria'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman.

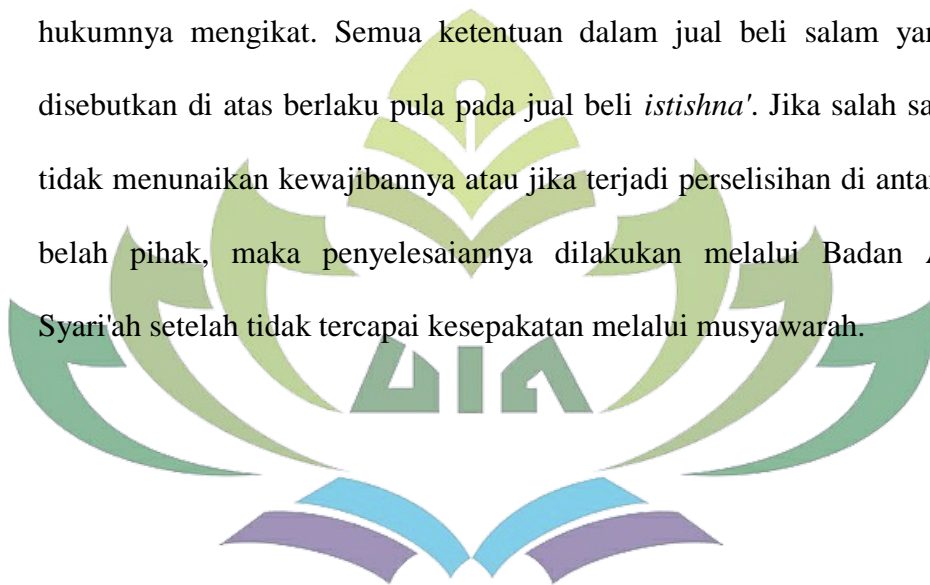
Dengan segala pertimbangan dan dasar hukum yang sudah ada Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang JUAL BELI *ISTISHNA'* dengan ketentuan.

Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Dalam hal pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan

tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah**

###### **a) Sejarah Singkat**

Desa Payung Batu adalah salah satu kampung yang berada di Kecamatan Pubian Lampung Tengah. Desa Payung Batu berjarak sekitar 95 km dari pusat kota Bandar Lampung, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan darat.

Pada mulanya Kecamatan Pubian (sekarang) dahulu masih bergabung dengan Kecamatan Padang ratu, namun sekitar tahun 1970an Pubian memisahkan diri dengan Kecamatan Padang Ratu dan mendirikan Kecamatan sendiri yaitu Kecamatan Pubian. Nama Pubian sendiri berasal dari nama salah satu marga yang ada di Lampung yaitu Marga Pubian, yang terdiri dari enam kampung yaitu kampung Segala Mider, Negeri Kepayungan, Tanjung Kemala, Negeri Ratu, Gunung Aji dan Gunung Raya.

Kampung Payung Batu awalnya merupakan Kampung Tua dari marga dengan penduduk asli suku Lampung Pubian. Pusat kegiatan adat dan kegiatan masyarakat terletak di tepian sungai Seputih dengan pemerintahan berbentuk marga di bawah Kepemimpinan seorang sorang kebandaran sejak tahun 1202. Pemerintahan ini berlangsung sejak tahun 1837 dan berubah menjadi Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian

dengan luas area mencapai 40.000 Ha, adapun mata pencaharian penduduk asli adalah petani dan berkebun.

Pada tahun 1965 didatangkanlah transmigrasi umum dari pulau Jawa rombongan pertama berasal dari daerah Bandung Jawa Barat. Kemudian berangsur-angsur didatangkan lagi rombongan dari daerah Jawa yaitu Magelang, Karang Anyar, Seragen, Wonogiri, Jepara, Pekalongan, dan Jogjakarta.

Pada tahun 1979 diadakanlah pemilihan kepala kampung yang pertama kali, dengan hasil Bapak Miscbah Buchori terpilih sebagai Kepala Kampung. Dengan pesatnya pembangunan dan penambahan penduduk, pada tahun 1987 Kampung Payung Batu dimekarkan menjadi dua Kampung, yaitu Kampung Payung Batu dan Kampung Tanjung Mas. Akibat tuntutan pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah, untuk mengembangkan sektor industri dan ekonomi maka terjadilah perubahan penggunaan area pada sebagian besar wilayah Payung Batu yaitu dengan dibuka dan dibangunnya perkebunan besar.

Kerjasama penduduk asli dengan penduduk transmigrasi dapat berjalan dengan baik untuk bersama-sama membangun Kampung yang dilandasi dengan semangat gotong royong atau sakai sembayan, sehingga berangsur-angsur Kampung Payung Batu melihatkan kemajuan yang ditandai dengan dibangunnya prasarana Balai Kampung, Sekolah, Masjid, Pos Ronda, dll.

Kehidupan dan kesejahteraan penduduknya semakin meningkat, terlihat dari pembangunan dan perkembangan prasarana perumahan warga yang cukup memadai. Namun dari segi kepemilikan lahan pertanian untuk setiap kepala keluarga (KK) masih tergolong kurang mencukupi. Tingkatan pendidikan yang rendah sebagian penduduk Kampung Terbanggi lir bekerja sebagai petani dan buruh di perkebunan.

#### b) Demografi

##### 1. Geografis

Kampung Terbanggi lir salah satu dari 9 kampung wilayah Kecamatan Pubian yang terletak 3 KM dari kota kecamatan. Kampung Payung Batu mempunyai luas wilayah 24.800 Ha.

##### 2. Iklim

Kampung Terbanggi lir sebagai mana kampung lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, sehingga berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kampung Payung Batu.

#### c) Kepemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan ternak hewan oleh penduduk Kampung Payung Batu adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1	Ayam	3.825
2	Itik	3.825
3	Kambing	4.106
4	Sapi	406



#### d) Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan masyarakat Kampung Payung Batu adalah sebagai berikut:

Pra Sekolah	: 264 orang
SD	: 1.435 orang
SMP	: 610 orang
SLTA	: 386 orang
SARJANA	: 64 orang

#### e) Jumlah Penduduk Akhir 2016

Kampung Payung Batu mempunyai jumlah penduduk 6.130 jiwa yang tersebar dalam enam dusun dengan perincian sebagai berikut:

Dusun	: 691 jiwa
Dusun I	: 777 jiwa
Dusun II	: 821 jiwa
Dusun V	: 630 jiwa
Dusun V	: 2.836 jiwa
Dusun VI	: 375 jiwa

#### f) Mata Pencarian

Kampung Payung Batu merupakan kampung pertanian, maka sebagian besar penduduknya adalah petani, selengkapnya sebagai berikut:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Petani	2.155	48.53
2	Pedagang	274	6.17
3	PNS	30	0.68
4	Buruh	1.982	44.63
Jumlah		4.441	100

g) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Kampung Payung Batu sebagian besar diperuntukan untuk lahan pertanian.

h) Sarana dan Prasarana Kampung

Kondisi sarana dan prasarana umum Kampung Payung Batu secara garis besar sebagai berikut:

Balai Kampung : ada

Kantor Kampung : tidak ada

Kecamatan : 5 Km

Kabupaten : 82 Km

Provinsi : 174 Km

i) Pembagian Wilayah Kampung

Kampung Payung Batu mempunyai pembagian wilayah yang tersebar dalam enam dusun dengan perincian sebagai berikut:

1. Dusun Payung Batu, Kepala Dusun Bpk. Jupri
2. Dusun I Payung Batu, Kepala Dusun Bpk. rwanto
3. Dusun II Payung Batu, Kepala Dusun Bpk. Suyidno
4. Dusun V Tanjung Mas, Kepala Dusun Bpk. Teguh
5. Dusun V Tanjung Mas, Kepala Dusun Bpk. Anton rawan

6. Dusun VI Tanjung Mas, Kepala Dusun Bpk. R. rawan

2. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Tampung Tengah

Konveksi Arda Jaya Tailor adalah usaha rumahan sendiri yang di bangun oleh sepasang suami stri Bapak Sariono dan bu Sumarti. Mereka telah merintis konveksi tersebut sejak tahun 2000, berawal dari keduanya memiliki soft skill yang sama yaitu seorang penjahit pakaian. Lalu setelah mereka sah menjadi sepasang suami istri mereka mulai membangun usaha konveksi tersebut.

Dengan modal awal yang terbilang seadanya, pada waktu itu mereka hanya menerima permintaan dari para tetangga sekitar untuk di buatkan pakaian, pada saat tu mereka hanya menawarkan jasa pembuatan baju celana dll, dalam arti mereka belum menyediakan bahan/kain pakaian. Semakin bertambah konsumen yang mengetahui konveksi milik Bapak Sariono dan ibu Sumarti ini, mereka lantas mulai berani untuk menambahkan modal, dengan mulai menyediakan atau men-stok kain atau bahan yang akan di gunakan untuk pakaian, terlebih bahan untuk seragam anak sekolah.

Kegiatan transaksi jual beli ni berjalan sangat lancar, bapak Sariono dan bu Sumarti sudah mempunyai banyak pelanggan dan bertambahnya barang pesanan yang dibuat. Seiiring berjalannya waktu, konveksi tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ketahun. Dan konveksi tersebut dinamai oleh ibu sumarti Arda Jaya Tailor. Dan sudah banyak diketahui oleh masyarakat.

Meningkatnya pesanan dari hari kehari, mengakibatkan bapak Sariono merombak atau memperluas tempat usaha tersebut menjadi lebih besar. Dengan bertambah banyaknya pesanan menuntut mereka harus memperkerjakan karyawan untuk membantu pekerjaan mereka, dan hingga saat ini bapak Sariono dan bu Sumarti memiliki 6 orang karyawan. 3 orang di bagian mesin jahit dan 2 orang di bagian sablon dan 1 di bagian antar jemput barang dan pesanan. Bertambah banyak pesanan yang diterima, bapak Sariono menargetkan kepada karyawannya untuk terus produktif dan memaksimalkan tenaga mereka setiap harinya.

Setiap minggunya tak jarang mereka mendapatkan pesanan dalam skala banyak. Di antaranya seragam sekolah dan pakaian dinas atau seragam untuk keluarga besar. Dalam sistem pembayaran ada beberapa macam yang bapak Sariono dan ibu Sumarti gunakan, seperti membayar uang muka terlebih dahulu, kredit dan lunas.

Modal yang dikeluarkan dalam sebulan berjumlah 7 juta. Omset yang diterima dalam 1 bulan berjumlah 10 juta, bahkan bisa lebih jika orderan yang diterima lebih banyak dari biasanya. Produk yang dapat dihasilkan dari konveksi tersebut di antaranya pakaian sekolah, pakaian dinas, kaos olahraga, PDH, dan pakaian sehari-hari keluarga.

1. Pakaian seragam SD : Rp. 100.000
2. Pakaian seragam SMP : Rp. 135.000
3. Pakaian Seragam SMA : Rp. 150.000
4. Pakaian dinas/kantor : Rp. 250.000

5. PDH : Rp. 120.000

6. Kaos olahraga : Rp. 75.000

### 3. Letak Konveksi Arda Jaya Tailor

Letak konveksi Arda Jaya Tailor berada di Jl. Raya Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, berada di pinggir jalan bersebalahan dengan para pengrajin batu bata. Letaknya yang tidak begitu strategis, namun cukup eksis dari waktu ke waktu dikarenakan mereka konsisten pada setiap produk yang dihasilkan. Sehingga banyak konsumen yang kembali memakai jasa mereka dan menjadi pelanggan.

Bangunan konveksi Arda Jaya Tailor dari awal berdiri hingga sekarang masih satu bangunan dengan rumah yang bapak Sariono dan ibu Sumarti tempati dengan luas 10x17m<sup>2</sup>. Dan konveksi Arda Jaya Tailor berada di salah satu ruangan depan rumah tersebut.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Sistem Pembayaran pada Konveksi Arda Jaya Tailor di Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam melakukan transaksi untuk pembayaran barang yang dijual tersebut maka ini sering dikenal sebagai "*term of payment*". Terdapat tiga pembayaran yang secara umum terdapat resiko dan stabilitas yang berbeda antara pembeli dan penjual, yakni:<sup>53</sup>

- a. Pembayaran dimuka yaitu pembeli membayar kepada penjual sebelum membawa barang tersebut yang diperoleh dibeli dari penjual.

---

<sup>53</sup>Edward G. Hinkelman, *Metode Pembayaran Bisnis*, Jakarta, PPM, 2002, h. 13-14

Sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi tu dilanjutkan oleh para pihak, maka uang pembayaran tersebut termasuk kedalam harga pembayaran.

- b. *Documentary collection* adalah sama dengan metode *cash on delivery/* COD yang berarti lunas pada saat barang diserahkan.
- c. *Open account* adalah penjual dan pembeli sepakat bahwa barang dikirim terlebih dahulu dan dibayar setelah barang dikirim. Pemesan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu untuk dibuatkan, pemesan dan penjual sepakat bahwa pembayaran akan dilunasi apabila barang sudah dikirim kepada pemesan.

Pada konveksi Arda Jaya Tailor cara yang dilakukan dalam pembayaran yaitu dengan pembayaran dimuka yaitu pembeli membayar kepada penjual sebelum membawa barang, *Documentary collection* yakni lunas pada saat barang diserahkan, *Open account* yakni penjual dan pembeli sepakat barang dikirim terlebih dahulu dan dibayar setelah barang dikirim. Dalam penerapan sistemnya konveksi Arda Jaya Tailor, banyak pemesan yang menggunakan sistem pesanan membayar uang muka terlebih dahulu dan akan dilunasi saat barang sudah selesai dibuat.

## 2. Pelaksanaan Jual Beli *stishna* ' pada Konveksi Arda Jaya Tailor di Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah

Jual beli pesanan merupakan kontrak/kesepakatan penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam hal ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. penjual lalu berusaha melalui orang lain untuk



membuat menurut spesifikasi yang telah disepakati bersama kepada pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai barang tersebut selesai dibuatkan. Dari pihak karyawan menambahkan bahwa dalam kesepakatan atau perjanjian tersebut tidak terdapat unsur paksaan semua dilakukan dengan kesadaran diri, transaksi pembayaran antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.<sup>54</sup>

Konveksi Arda Jaya Tailor merupakan tempat usaha dibidang pembuatan pakaian yang menggunakan konsep pesanan (*istishna*). Pelaksanaan dalam melakukan pesanan di konveksi Arda Jaya Tailor tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, pembeli memesan terlebih dahulu barang yang ingin dibuat, lalu penjual membuat barang tersebut sesuai keinginan pembeli.

Pihak pembeli memesan barang yang ingin dibuat, lalu disepakati bersama dengan penjual, setelah keduanya sepakat dengan barang tersebut tahap selanjutnya pihak penjual melakukan kesepakatan dalam menetapkan harga barang dengan pemesan, setelah dilakukan penetapan harga maka pihak penjual melalui orang lain membuat barang tersebut dalam waktu seminggu sesuai dengan waktu dalam membuat barang tersebut. Pembeli membayar uang muka sebagai jaminan untuk barang yang dipesan dan akan dilunasi ketika barang sudah selesai dibuat,

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Joko, karyawan Konveksi Arda Jaya Tailor tanggal 10 September 2019

selanjutnya setelah barang telah selesai dibuat oleh pihak konveksi, barang akan diantar kepada pembeli.

Pelaksanaan yang di lakukan pada konveksi Arda jaya Tailor dalam penjualan kembali barang yang di pesan, yaitu pemesan menjual barang yang belum selesai pengerjaannya dari pihak konveksi kepada orang lain atau dalam hal ini pemesan menawarkan barang kepada orang lain hanya dengan menunjukan spesifikasi pada barang yang di jual melalui gambar atau foto barang tersebut. Sehingga dalam hal ini jelas perbuatan yang di lakukan oleh pemesan (*mustashni*) terdapat kesenjangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 06 tahun 2000 tentang Jual Beli *istishna*'.

Tindakan yang dilakukan oleh pembeli dalam hal ini tentunya telah melanggar ketentuan jual beli *istishna*' dalam putusan fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang barang bahwa pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

## BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Setelah mengumpulkan data, baik yang didapat dari perpustakaan maupun dari lapangan yang kemudian sudah dituangkan dalam penyusunan pada bab-bab sebelumnya, maka pada selanjutnya bab ini sebagai langkah akan menganalisis data yang telah dikumpulkan.

### 1. Praktik Jual Beli *istishna'* Pada Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah

Lampung Tengah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, *bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (suplyer) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplyer berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.<sup>55</sup>

Pada dasarnya, *bai' istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Husaini Mansur Dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Visi Citah Kreasi, 2007), Cet. , h. 102.

<sup>56</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Eds. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), h. 126.

Kaitan dengan jual beli *istishna'* DSN-MUI menetapkan fatwa sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan tentang pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang barang.

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahan dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga : Ketentuan lain :

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
  2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *stishna*'.
  3. Jika salah satu pihak tidak menunaikannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Kesesuaian dan Atau Tidak Sesuai Jual Beli *stishna*' Pada Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000

Jual beli pesanan yang terjadi di konveksi Arda Jaya Tailor antara pembeli dan penjual merupakan sistem jual beli yang dilakukan secara pemesanan terlebih dahulu dan dilakukan oleh orang-orang (penjual dan pembeli) yang sudah dewasa. Transaksi jual beli ni diawali oleh pemesan yang mendatangi toko untuk memesan barang dan memilih desain yang ingin dibuat.

Pembeli memesan kepada penjual agar di buatkan beberapa pasang seragam sekolah dasar. Setelah diketahui spesifikasi dan model yang diinginkan oleh pembeli, maka selanjutnya mereka bersepakat dalam sistem pembayaran dan pembeli menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi. Dan kemudian penjual/pembuat meminta tempo waktu selama seminggu untuk menyelesaikan pesananan tersebut.

Sementara menunggu pesanan selesai di buat, pembeli melalui sosial media (facebook) mulai menawarkan barang yang baru saja di pesannya kepada orang lain sesama pengguna sosial media. Dan kemudian jika ada yang tertarik kepada barang yang di iklankan oleh pembeli, dan sepakat untuk membelinya. Maka pemesan barang (*mustashni*) memberikan tempo atau tanggal ketersediaan barang yang hendak di beli oleh calon pembeli. Atau dalam dunia jual beli hal seperti ini di sebut PO (pre order).

Pre-Order (PO) merupakan sebuah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal kepada penyedia barang, dengan masa tenggang waktu kedatangan barang yang telah di tentukan penjual. Dengan kata lain, pelanggan membayar sebelum barang di order dan pre-order memiliki jangka waktu yang ditentukan. Maka, setiap barang yang akan di pre order, selalu diberikan batas waktu untuk memesan. Dengan demikian, pre-order bukan pesan langsung jadi karena pre-order butuh waktu agar barang yang pelanggan pesan dan bayar dapat sampai di rumah.

Pada dasarnya transaksi jual beli dengan sistem langsung ataupun PO harus memperhatikan aspek kehalalan produk. Sehingga tidak boleh menjual barang/jasa yang haram. Seperti menjual barang najis, barang hasil curian dan sebagainya. Sistem PO membuat seorang pembeli tidak dapat melihat bentuk barangnya secara langsung. Barang hanya dapat dilihat melalui gambaran yang diberikan oleh penjual. Baik berupa foto



maupun video, Untuk menghindari ketidak jelasan terhadap produk maka foto maupun video yang diberikan oleh penjual harus dibuat sejelas-jelasnya termasuk deskripsi terhadap produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terdapat *gharar* (ketidakjelasan) dalam produk yang dijual.

Pelaksanaan akad *istishna'* pada Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah seperti yang di paparkan di atas, sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *istishna'*, karna kedua belah pihak bersepakat bahwa pembeli memesan baju seragam sekolah kepada penjual dengan bahan di tanggung oleh penjual dan dalam sistem pembayaran mereka sepakat untuk di bayar di muka lalu pelunasan di akhir sesuai dengan barang pesananan selesai di buat.

Namun demikian ada ketidaksesuaian pula setelah akad *istishna'* terjadi, pembeli yang sudah memesan barang kepada penjual dan telah membayar uang muka, kemudian pembeli menawarkan dan hendak menuai kembali barang yang di pesannya kepada orang lain melalui sosial media, dan apabila ada yang tertarik dan hendak membeli. Maka pembeli (pemesan) memberikan tempo ketersediaan barang pada calon pembeli dalam waktu sampai barang yang di pesannya selesai di buat. Dalam hal ni tentu terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 pada ketentuan tentang barang, bahwa pembeli (*shani'*) dilarang menjual kembali barang yang dibeli secara *istishna'*.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

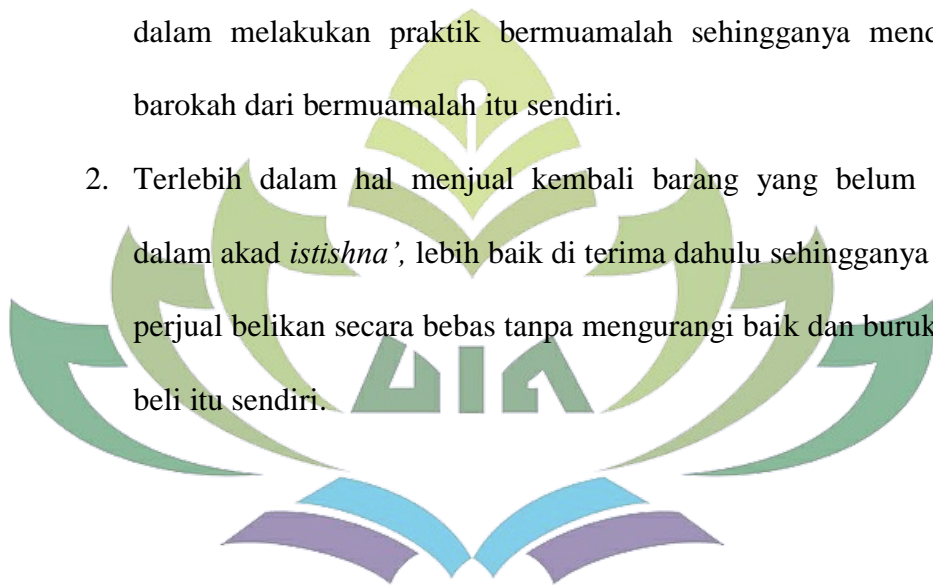
Berdasarkan uraian pada pembahasannya ini, setelah dianalisis maka penelitian ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep jual beli secara *istishna'* menurut fatwa DSN-MUI merupakan kontrak penjualan atas jenis barang yang belum ada di tempat (*ready stok*) antara *shani'* (penjual/suplyer) dengan *mustashni'* (pembeli) dengan bahan baku disediakan oleh penjual/suplyer. Dalam hal pembayaran harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimannya. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
2. Pelaksanaan jual beli *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *istishna'* dimana *mustashni'* sebagai pembeli memesan barang kepada *shani'* selaku penjual dengan bahan baku yang sebelumnya sudah di sediakan oleh *shani'* (penjual/suplyer). Dalam sistem pembayaran *mustashni'* (pembeli) membayarkan uang muka sebagai tanda jadi akad dan akan di lunasi di akhir sesuai dengan barang yang di pesannya selesai di buat oleh *shani'* (penjual/suplyer) .

## B. SARAN

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dengan mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna'* diharapkan agar kita lebih bijak dalam melakukan praktik bermuamalah sehingganya mendapatkan barokah dari bermuamalah itu sendiri.
2. Terlebih dalam hal menjual kembali barang yang belum diterima dalam akad *istishna'*, lebih baik di terima dahulu sehingganya dapat di perjual belikan secara bebas tanpa mengurangi baik dan buruknya jual beli itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan slam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suedy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al- slamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqaid wa Tārikh al- Mazahib al-Fiqhiyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiyy.
- Ahmad Sukardja, Mugar Syarif, *Tiga Kategori Hukum, Syari'at dan Kanun*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Anton Bakker, A.Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Andri Yusuf, [Http://Phairha.Blogspot.Co.Id/2012/01/Studi-Kepustakaan.Html](http://Phairha.Blogspot.Co.Id/2012/01/Studi-Kepustakaan.Html). Diunduh Pada 19 Nov 2018 Pukul 21:35.
- Alquran dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia, 2003.
- Alquran dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Al-Hafidh mam bnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.875, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 "Bulughul Maram", Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di ndonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Jihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Titian lahi Press, 1997.
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum slam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Al Kamal bnu Human dalam Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GIP, 2001.

Azyumardi Azra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi slam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata slam*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Adiwarman A. Karim, *Bank slam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Eds. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007.

Ahmad, *Nazariah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibiy*, Cet. ; al-Muassasah al-Jāmi'iyah li al-Dirāsāt wa al-Nusyu wa al-Tauzi', 1992.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam slam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Dewan Syari'ah Nasional MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Dipenogoro, 2000.

Deden Kushendar, *Ensiklopedi Jual Beli Dalam slam*, 2010.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung, CV, Penerbit Diponegoro, 2007.

Dewan Redaksi Fokusmedia (ed.), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2010.

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkat Mulia nsani, 2014.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum slam*, Bagian Pertama Cet. , Jakarta: Logos Wacana lmu, 1997.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum slam*, Jakarta: Logos Wacana lmu, 1999.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Rajawali Press, 2010.

<http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasarhukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangny/> di akses senin 08 Maret 2019 pukul 05:49.

## **PANDUAN WAWANCARA**

Responden: Pemilik Konveksi

1. Identitas responden :

- a. Nama : Sariono
- b. Usia : 42 Tahun
- c. Pendidikan : SD
- d. Status/Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Alamat : Jalan Raya Payung Batu, Kec Pubian, Kabupaten Lampung Tengah

2. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

- a. Sejak kapan berdirinya konveksi Arda Jaya Tailor ?

Jawaban : Saya mulai merintis usaha ini bersama istri saya pada awal tahun 2000.

- b. Siapa yang bertanggung jawab dan mengelola konveksi Arda Jaya Tailor?

Jawaban : Saya dan istri saya yang bertanggung jawab dengan konveksi ini.

- c. Berapa banyak karyawan yang bekerja di konveksi Arda Jaya Tailor ?

Jawaban : Untuk saat ini saya memiliki 6 orang karyawan, 3 orang di bagian mesin jahit, 2 di bagian sablon dan 1 di bagian antar jemput barang pesanan.

- d. Bagaimana sistem pembagian pekerjaanya ?

Jawaban : Ya tentunya saya sesuaikan dengan kemampuan awal mereka mulai bekerja disini.

- e. Apa saja produk yang di hasilkan pada konveksi Arda Jaya Tailor ?

Jawaban : Mulai awal merintis usaha ini sampai sekarang produk yang bisa di hasilkan dari konveksi ini mulai dari seragam sekolah, kaos olahraga hingga baju kantor pemda.



f. Berapa harga dari masing-masing produknya ?

Jawaban : Seragam sekolah dari Sd-SMA mulai dari Rp. 100.000-150.000, pakain dinas Rp. 250.000 dan kaos olahraga Rp. 75.000.

g. Bagaimana praktik pelaksanaan jual beli *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor ?

Jawaban: Biasanya pelanggan saya memesan untuk di buatkan seragam sekolah untuk anaknya, lalu kemudian setelah selesai proses pengukuran. Pelanggan saya lalu memberikan uang muka atau tanda jadi, lalu akan di lunasi nanti bersamaan dengan pesanan seragam sekolah anaknya selesai di buat.



Lampung Tengah September 2019

Responden

**Sariono**

## **PANDUAN WAWANCARA**

Responden: Pembeli

### 1. Identitas responden

- a. Nama : Suratmi
- b. Usia : 28 Tahun
- c. Pendidikan : SMP
- d. Status/Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- e. Alamat : Jalan Raya Payung Batu, Kec Pubian, Kab Lampung Tengah

### 2. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

- a. Sejak kapan berkunjung di konveksi Arda Jaya Tailor ?  
Jawaban : saya mulai berkunjung pada konveksi ini sejak awal tahun 2017.
- b. Sejak kapan berlangganan di konveksi Arda Jaya Tailor ?  
Jawaban : Saya mulai menjadi pelanggan di konveksi ini sejak anak saya masih duduk di kelas 1 SD, dan sekarang sudah kelas 3 Sd, tahun saya menjadi pelanggan Konveksi ini.
- c. Produk apa yang sering anda pesan di konveksi Arda Jaya Tailor ?  
Jawaban : Karna anak saya masih duduk di bangku Sekolah Dasar, saya seringnya pesan seragam sekolah untuk anak saya.
- d. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan dalam jual beli pesanan ini ?  
Jawaban : Saya biasanya memberikan uang muka sekaligus tanda jadi untuk pesanan saya, lalu akan saya lunasi setelah barang pesanan saya selesai di buat oleh pihak konveksi.

Lampung Tengah September 2019

Responden

**Suratmi**

## **PANDUAN WAWANCARA**

Responden: Pembeli

### 1. Identitas responden

- a. Nama : Maysaroh, SE
- b. Usia : 35 Tahun
- c. Pendidikan : S1
- d. Status/Pekerjaan : PNS
- e. Alamat : Jalan Raya Gunung Haji, Kec Pubian, Kab Lampung Tengah

### 2. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

- a. Sejak kapan berkunjung di konveksi Arda Jaya Tailor ?

Jawaban : saya mulai berkunjung pada konveksi ini sejak awal tahun 2016.

- b. Sejak kapan berlangganan di konveksi Arda Jaya Tailor ?

Jawaban : Saya mulai menjadi pelanggan di konveksi ini sebelum saya bekerja di pemda, lebih tepatnya sudah 7 tahun menjadi pelanggan di konveksi ini.

- c. Produk apa yang sering anda pesan di konveksi Arda Jaya Tailor ?

Jawaban : saya pernah memesan untuk di buat kan seragam kantor saya dan juga sering saya memesan untuk di buat kan seragam sekolah untuk anak saya yang masih duduk di bangku SMA.

- d. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan dalam jual beli pesanan ini ?

Jawaban : dalam hal pembayaran saya biasanya melunasi di awal atau lebih sering saya membayar uang muka lalu saya lunasi sampai pesanan saya selesai di buat oleh pihak konveksi.

Lampung Tengah September 2019

Responden

**Maysaroh, SE**

## **PANDUAN WAWANCARA**

Responden: Karyawan

### 1. Identitas responden:

- a. Nama : Joko
- b. Usia : 22 Tahun
- c. Pendidikan : SMP
- d. Status/Pekerjaan : Karyawan
- e. Alamat : Jalan Raya Payung Batu, Kec Pubian, Kab Lampung Tengah

### 2. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

- a. Sejak kapan bekerja di konveksi Arda Jaya Tailor ?  
Jawaban : saya mulai bekerja menjadi karyawan disini sejak tahun 2015.
- b. Di bagian apakah anda bekerja ?  
Jawaban : Saya bekerja di bagian mesin jahit.
- c. Mengapa anda memilih atau dipilih untuk bekerja di bagian tersebut ?  
Jawaban : Sebelumnya saya pernah belajar menjahit di salah satu sekolah jahit, dan kemudian atas pertimbangan pemilik konveksi, Bapak Sariono menempatkan saya di bagian mesin jahit.
- d. Berapa banyak orderan yang bisa di selesaikan selama sehari ?  
Jawaban : saya dalam sehari biasanya bisa menyelesaikan satu hingga dua setel seragam sekolah

Lampung Tengah September 2019

Responden

**Joko**

# LAMPIRAN

